

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam negara hukum perlindungan terhadap hak asasi manusia harus dijamin oleh negara, dimana setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintah, ini merupakan konsekuensi prinsip kedaulatan rakyat serta prinsip negara hukum. Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut, antara lain bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.¹

Di Indonesia sendiri hal ini dapat dilihat dari keberadaan notaris yang berfungsi untuk membuat akta autentik sebagai alat bukti mengenai hubungan hukum antara individu dengan individu lainnya. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang. Pembuatan akta autentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dan ada juga yang dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.²

Kebutuhan akan pembuktian tertulis, berupa akta autentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum yang

¹ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 7.

² Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

merupakan salah satu prinsip dari negara hukum. Hal ini juga dipengaruhi oleh perkembangan yang pesat dalam dunia pendidikan dimana memberikan dampak yang besar terhadap kemajuan di bidang intelektual yaitu menimbulkan pemikiran yang lebih maju di segala bidang terutama dalam bidang hukum.

Pada dasarnya pembuktian tertulis dilakukan dengan akta autentik dan akta di bawah tangan. Menurut Pasal 1868 KUHPdata, akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, notaris adalah satu-satunya yang mempunyai wewenang umum itu.³

Apabila suatu akta merupakan akta autentik, maka akta tersebut akan mempunyai 3 (tiga) fungsi terhadap para pihak yang membuatnya yaitu:⁴

1. Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu;
2. Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak;
3. Sebagai bukti bagi para pihak bahwa pada tanggal tertentu kecuali jika ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.

³ Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

⁴ Salim HS, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 43.

Akta autentik yang dibuat oleh notaris ada 2 (dua) jenis yaitu akta yang dibuat oleh (*door*) notaris atau yang dinamakan akta *relaas* atau akta pejabat (*ambtelijke akten*) dan akta yang dibuat di hadapan (*ten overstaan*) notaris atau yang dinamakan akta *partij* (*partij akten*).⁵ Dalam akta *relaas*, notaris menulis atau mencatatkan semua hal yang dilihat atau didengar sendiri secara langsung oleh notaris yang dilakukan para pihak. Akta pihak adalah akta yang dibuat di hadapan notaris atas permintaan para pihak. Notaris berkewajiban untuk mendengarkan pernyataan atau keterangan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan sendiri oleh para pihak di hadapan notaris. Pernyataan atau keterangan para pihak tersebut oleh notaris dituangkan ke dalam akta notaris.⁶

Akta di bawah tangan adalah suatu surat yang ditandatangani dan dibuat dengan maksud untuk dijadikan bukti dari suatu perbuatan hukum. Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan bukti yang sempurna seperti akta autentik, apabila isi dan tanda tangan dari akta tersebut diakui oleh orang yang bersangkutan.⁷ Menurut Pasal 1874 KUHPdata akta di bawah tangan merupakan akta yang ditandatangani di bawah tangan, seperti surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga, dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum.

Seorang notaris di dalam menjalankan jabatannya harus dapat bersikap profesional dengan dilandasi kepribadian yang luhur dan senantiasa melaksanakan Undang-Undang sekaligus menjunjung tinggi kode etik profesinya yaitu kode etik notaris. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris,

⁵ Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1996. hlm. 51.

⁶ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 45.

⁷ Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 39.

yang menyatakan bahwa seorang notaris diharapkan dapat bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Selain itu, notaris sebagai pejabat umum harus dapat mengikuti perkembangan hukum sehingga dalam memberikan jasanya kepada masyarakat, dapat membantu mengatasi dan memenuhi kebutuhan hukum yang terus berkembang serta memberikan jalan keluar yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu, notaris dalam melaksanakan tugasnya harus tunduk dan terikat pada Undang-Undang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kode Etik Notaris dan peraturan hukum lainnya.⁸

Notaris mempunyai tugas utama yang berat, karena harus memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Notaris melalui akta-akta yang dibuat oleh atau di hadapannya, terkandung suatu beban dan tanggung jawab untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak. Untuk itu, diperlukan suatu tanggung jawab baik individual maupun sosial, terutama ketaatan terhadap norma-norma hukum positif dan kesediaan untuk tunduk pada kode etik profesi, sehingga akan memperkuat norma hukum positif yang sudah ada. Seorang notaris harus menjunjung tinggi tugasnya serta melaksanakannya dengan tepat dan jujur, yang berarti bertindak menurut kebenaran sesuai dengan sumpah jabatan notaris. Seorang notaris dalam memberikan pelayanan, harus mempertahankan cita-cita luhur profesi sesuai dengan tuntutan kewajiban hati nurani.⁹

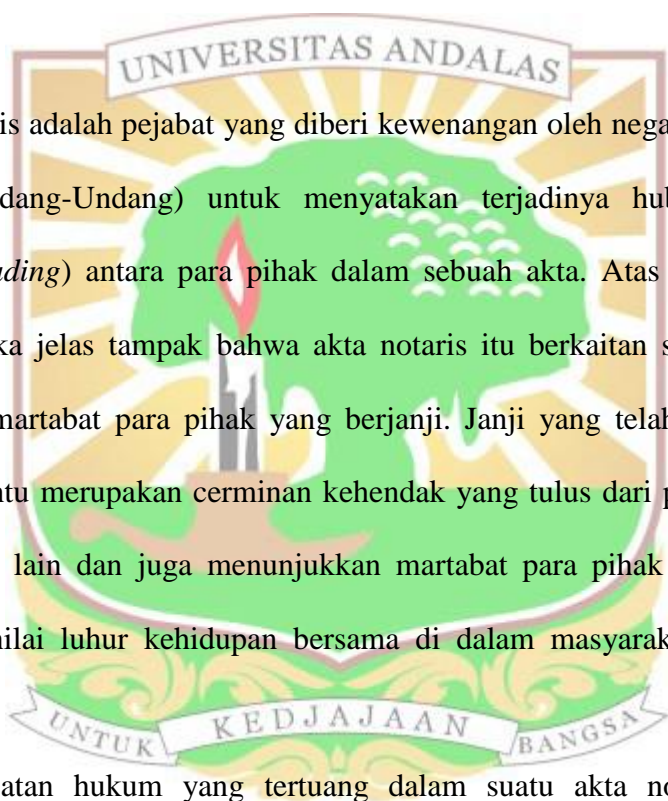
Sudah sewajarnya bila kepada notaris selaku pejabat umum yang diangkat oleh negara dan bekerja untuk negara diberikan perlindungan hukum yang secukupnya, karena ruang lingkup pekerjaannya sangat luas dan kompleks.

⁸ Putri, AR, *op, cit.*, hlm. 5.

⁹ Muhammad Abdul Kadir, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 60.

Adapun fungsi notaris di bidang pekerjaannya adalah berkewajiban dan bertanggung jawab terutama atas pembuatan akta autentik yang telah dipercayakan kepadanya, khususnya di bidang hukum perdata, menyimpan minuta aktanya, termasuk semua protokol notaris dan memberi grosse, salinan dan petikan. Selain itu, notaris berfungsi untuk melakukan pendaftaran atas surat di bawah tangan, membuat dan mengesahkan salinan atau turunan berbagai dokumen serta memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.¹⁰

Notaris adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh negara (berdasarkan ketentuan Undang-Undang) untuk menyatakan terjadinya hubungan hukum (*rechts verhouding*) antara para pihak dalam sebuah akta. Atas dasar hal yang demikian, maka jelas tampak bahwa akta notaris itu berkaitan secara langsung dengan nilai martabat para pihak yang berjanji. Janji yang telah dinyatakan di dalam akta tentu merupakan cerminan kehendak yang tulus dari para pihak, satu terhadap yang lain dan juga menunjukkan martabat para pihak yang dilandasi dengan nilai-nilai luhur kehidupan bersama di dalam masyarakat, bangsa dan negara.¹¹



Perbuatan hukum yang tertuang dalam suatu akta notaris bukanlah perbuatan hukum dari notaris, melainkan akta tersebut memuat perbuatan hukum dari pihak-pihak yang meminta atau menghendaki secara mufakat perbuatan hukum tersebut untuk dituangkan dalam suatu akta autentik.¹² Pihak dalam akta itulah yang terikat pada isi dari suatu akta autentik. Jika dalam suatu akta lahir hak dan kewajiban, maka salah satu pihak wajib memenuhi materi apa yang

¹⁰ Putri AR, *op. cit.*, hlm. 6.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 7.

¹² Lumban Tobing, *op. cit.*, hlm. 39.

diperjanjikan dan pihak lain berhak untuk menuntut. Notaris hanyalah pembuat untuk lahirnya suatu akta autentik. Jika terjadi suatu sengketa mengenai apa yang diperjanjikan dalam suatu akta notaris, notaris tidak terlibat sama sekali dalam pelaksanaan suatu kewajiban atau dalam hal menuntut suatu hak karena notaris berada di luar hukum pihak-pihak.¹³

Profesi notaris merupakan profesi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk pembuatan alat-alat bukti yang berupa akta sehingga notaris tidak boleh memihak ke salah satu pihak dan harus berlaku adil terhadap kedua belah pihak serta menjelaskan akibat-akibat perjanjian yang dibuatnya kepada kedua belah pihak terutama pihak yang lemah. Selain itu, notaris juga merupakan satu-satunya pejabat umum yang diangkat untuk pembuatan alat-alat bukti tersebut, sehingga notaris itu tidak melakukan perbuatan yang dilakukan para pihak tetapi hanya membuatkan alat bukti bagi kedua belah pihak, tetapi karena kurang pemahaman/pengertian dari atau pihak lainnya maka sering dianggap yang melakukan perbuatan hukum itu adalah notaris.¹⁴

Dalam praktek juga sering terjadi bahwa seorang notaris apabila terjadi masalah di antara para pihak yang bersangkutan notaris dilibatkan sebagai saksi di muka pengadilan dalam proses perkara dimana oleh salah satu pihak atau lebih dipergunakan suatu akta notaris sebagai alat bukti, atau bahkan dilibatkan sebagai tergugat dua, tiga, atau empat dalam suatu perkara perdata di muka pengadilan. Pada umumnya notaris dilibatkan sebagai tergugat hanya oleh karena notaris

¹³ Putri AR, *op. cit.*, hlm. 8.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 9.

membuat aktanya dan tidak ada kaitannya dengan apa yang menjadi materi pokok dari perjanjian yang menjadi perkara itu.¹⁵

Seperti sebuah kasus yang dialami oleh salah satu notaris berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor : 02/Pdt.G/2005/PN-BT, dimana notaris dijadikan saksi, terkait atas akta perjanjian peminjaman dan pengakuan hutang yang dibuat di hadapannya. Pihak pertama tidak mampu memenuhi ketentuan yang tercantum di dalam isi akta tersebut, dan dikarenakan sesuatu hal meninggal dunia, kemudian ahli waris menolak untuk bertanggung jawab. Pihak yang merasa dirugikan (pihak kedua) menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan perkara ini. Alasan penolakan yang dilakukan oleh ahli waris dari pihak pertama dikarenakan ia tidak mengetahui atas perjanjian tersebut. Mengapa pihak pertama pada saat perjanjian itu dibuat tidak memerlukan persetujuan dari isterinya.

Dalam hubungan ini ada sebagian dari para notaris yang menganut pendirian, bahwa apabila notaris dipanggil oleh pihak pengadilan sebagai saksi dalam suatu sengketa atau perkara dimana aktanya dipergunakan sebagai alat bukti tidak perlu bahkan dikatakan tidak ada kewajiban untuk hadir, mengingat adanya sumpah rahasia jabatannya. Pendirian atau pendapat yang sedemikian adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁶

Kasus lainnya yaitu berdasarkan putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor : 284/Pdt.G/2006/PA.Bkt yang mengadili sengketa perdata agama tentang Akad Al-Murabahah dan pada kasus ini notaris dijadikan turut tergugat I.

¹⁵ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *op. cit.*, hlm. 259.

¹⁶ *Ibid.*

Penggugat merupakan nasabah yang melakukan pembiayaan di salah satu bank syariah yang ada di kota Bukittinggi. Pembiayaan ini telah disepakati dan disetujui antara penggugat dan tergugat dengan syarat-syarat yang ada. Di tengah perjalanan, penggugat tidak mampu memenuhi kewajibannya. Tergugat pun mengirimkan surat teguran dan peringatan. Merasa ada yang janggal, penggugat mempersengketakan hal ini ke pengadilan agama. Penggugat menganggap notaris (turut tergugat) telah salah dan keliru terkait akta yang dibuatnya. Akta tersebut adalah dasar dari semua perjanjian yang dilakukan antara penggugat dengan tergugat.

Tidak ada satu pasal yang khusus mengatur tentang perlindungan hukum terhadap notaris di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Pada dasarnya perlindungan hukum tersebut hanya tersirat dalam Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris tentang pengawasan terhadap notaris yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi notaris di dalam menjalankan tugas dan jabatannya selaku pejabat umum. Pengawasan itu sangat diperlukan agar dalam melaksanakan tugas dan jabatannya notaris wajib menjunjung tinggi martabat jabatannya.

Menurut Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan notaris berwenang mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam

penyimpanan notaris. Pada dasarnya yang mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap notaris adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dalam pelaksanaan pengawasan tersebut dibentuk majelis kehormatan notaris, hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 67 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Jabatan Notaris.

Terkait dengan kedudukan serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh majelis kehormatan notaris sebagai lembaga perlindungan hukum kepada notaris tidak diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris maupun dalam peraturan perundang-undangan yang lain, sehingga hal ini menyebabkan implementasi dari ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris seolah-olah tidak berfungsi.¹⁷ Dapat dikatakan terjadinya kekosongan hukum (lebih kurang selama dua tahun) dalam penerapan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris karena tidak ada peraturan yang menjelaskan mengenai kedudukan serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap jabatan notaris melalui majelis kehormatan notaris ini.

Notaris sebagai salah satu perangkat hukum, memiliki hak ingkar sebagai pejabat umum yang profesional dengan harus memegang sumpah jabatannya untuk tidak memberitahukan isi aktanya, namun di sisi lain notaris harus berdiri pada kepentingan negara yang mana mengacu pada kepentingan publik guna terselesainya proses hukum dalam peradilan sehingga menghasilkan putusan yang adil, bermanfaat dan menjamin kepastian hukum. Notaris sebagai pejabat umum yang berkewajiban merahasiakan isi aktanya harus memperoleh perlindungan

¹⁷ I Gusti Agung Oka Diatmika, *Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris Berkaitan Dengan Adanya Dugaan Malpraktek Dalam Proses Pembuatan Akta Otentik*, Thesis, Magister Kenotariatan, Universitas Udayana, Denpasar, 2014, hlm. 11.

hukum manakala notaris yang bersangkutan harus membuka isi akta yang dibuatnya kepada lembaga yang berwenang sesuai dengan kapasitasnya.¹⁸

Akhir-akhir ini banyak berita di media baik cetak ataupun elektronik yang memberitahukan bahwa seorang notaris diajukan ke pengadilan sebagai tergugat, tersangka atau saksi baik dalam perkara perdata maupun pidana. Terkadang, notaris sering mendapatkan perlakuan yang kurang wajar baik saat dimintai keterangan menyangkut akta yang dibuatnya, dan lain sebagainya. Notaris bukanlah sebagai subjek yang kebal terhadap hukum, tetapi notaris termasuk warga negara yang memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya begitu juga di mata hukum. Notaris berhak mendapatkan perlindungan hukum yang layak dan diperlakukan secara adil sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang.

Seorang hakim pun tidak dapat membatalkan suatu akta notaris jika yang menjadi permasalahan adalah isi dari akta tersebut. Karena tanggung jawab dari isi sebuah akta notaris terletak pada para pihak, merekalah yang menyatakan keinginannya di hadapan notaris. Notaris dapat dimintai pertanggungjawabannya terkait terhadap akta yang dibuatnya jika yang bermasalah bagian kepala akta atau penutup akta. Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 702 K/Sip/1973, tanggal 5 September 1973.

Putusan tersebut menegaskan bahwa *judex factie* dalam amar putusannya membatalkan akta notaris, hal ini tidak dapat dibenarkan, karena pejabat notaris fungsinya hanya mencatatkan (menuliskan) apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap notaris tersebut. Tidak ada

¹⁸ Grace Novika Rasta, *Perlindungan Hukum Bagi Notaris Untuk Menjaga Kerahasiaan Isi Akta Yang Diperbuatnya Dalam Perkara Pidana*, Jurnal Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2015, hlm. 3.

kewajiban bagi notaris untuk menyelidiki secara materil hal-hal yang dikemukakan oleh penghadap notaris tersebut.¹⁹ Pembatalan dengan cara ini selaras dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1420 K/Sip/1978, tanggal 1 Mei 1979 dimana pengadilan tidak dapat membatalkan suatu akta notaris, tetapi hanya dapat menyatakan akta notaris tidak mempunyai kekuatan hukum, berarti hanya para pihaklah yang dapat membatalkannya.²⁰

Berdasarkan uraian di atas dan untuk mengakomodir kepentingan pembahasan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam suatu karya ilmiah berbentuk tesis dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya Jika Terjadi Sengketa Atau Perkara di Pengadilan”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diutarakan pada latar belakang masalah tersebut di atas, dan untuk memberikan ruang lingkup penelitian atau memberikan batasan terhadap permasalahan yang akan diteliti, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam karya ilmiah ini, yaitu:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi notaris terhadap akta yang dibuatnya dalam proses peradilan menurut aturan yang ada ?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap akta yang dibuat oleh notaris yang disengketakan atau diperkarakan di pengadilan ?

¹⁹ Habib Adjie, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 21.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 11.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan apa yang telah diuraikan pada latar belakang masalah dan perumusan masalah maka dapatlah dikemukakan tujuan dari penelitian yang dilakukan yaitu:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi notaris terhadap akta yang dibuatnya dalam proses peradilan menurut aturan yang ada.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap akta yang dibuat oleh notaris yang disengketakan atau diperkarakan di pengadilan.

D. Manfaat Penelitian

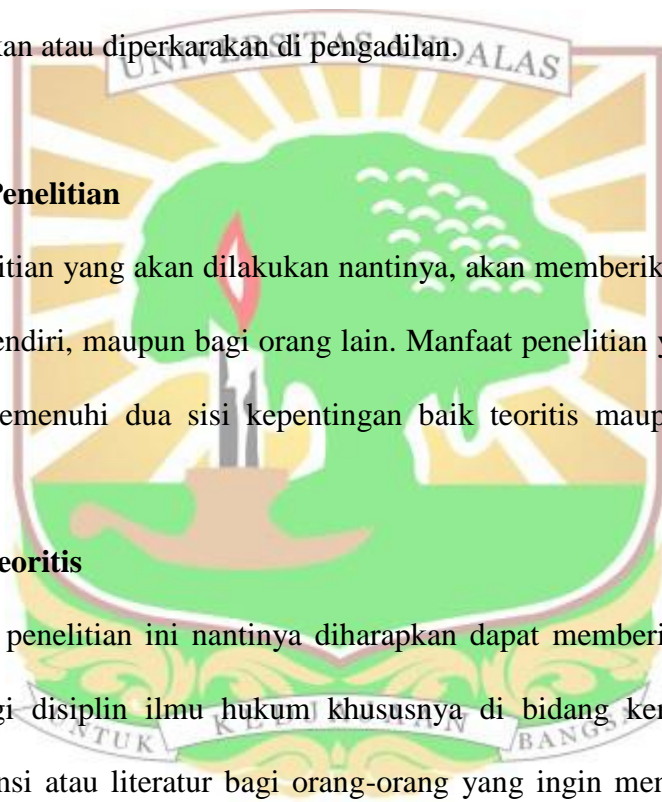
Penelitian yang akan dilakukan nantinya, akan memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri, maupun bagi orang lain. Manfaat penelitian yang diharapkan akan dapat memenuhi dua sisi kepentingan baik teoritis maupun kepentingan praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi disiplin ilmu hukum khususnya di bidang kenotariatan, serta sebagai referensi atau literatur bagi orang-orang yang ingin mengetahui tentang perlindungan hukum bagi notaris terhadap akta yang dibuatnya jika terjadi sengketa atau perkara di pengadilan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan referensi bagi masyarakat secara umum apa jabatan notaris itu sebenarnya dan mengapa notaris itu ada serta kaitan notaris dengan aktanya. Untuk notaris dan para calon notaris dapat dijadikan



bahan referensi maupun pertimbangan, bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya mereka berhak diberikan perlindungan hukum, jika mereka salah dapat pula dimintai pertanggungjawabannya. Serta bagi penulis sendiri, untuk perkembangan kemajuan pengetahuan, dan sebagai sarana untuk menuangkan sebuah bentuk pemikiran tentang suatu tema dalam bentuk karya ilmiah berupa tesis.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis terhadap hasil-hasil penelitian yang ada, permasalahan mengenai perlindungan hukum bagi notaris terhadap akta yang dibuatnya jika terjadi sengketa di pengadilan sebelumnya telah dilakukan dalam beberapa penelitian, antara lain:

1. Tesis atas nama Riva Elfiosa (Nim. 1320122033), Mahasiswi Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang Tahun 2015 yang berjudul “Kedudukan Keterangan Notaris Dalam Perkara Pidana Dikaitkan Dengan Kerahasiaan Jabatan Notaris”, permasalahan yang dibahas dalam tesis tersebut adalah:
 - a. Bagaimana kedudukan keterangan notaris dalam perkara pidana dikaitkan dengan kerahasiaan jabatan notaris ?
 - b. Bagaimana batasan seorang notaris dalam memberikan keterangan tentang kerahasiaan jabatan notaris dalam perkara pidana ?
2. Tesis atas nama Yanesia Utami (Nim. 1320123048), Mahasiswi Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang Tahun 2014 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam

Menjalankan Tugas dan Kewenangannya”, permasalahan yang dibahas dalam tesis tersebut adalah:

- a. Apakah bentuk tugas dan kewenangan dari notaris yang diatur dalam Undang-Undang ?
 - b. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangan ?
 - c. Kapan notaris dapat terlibat ke dalam suatu tindak pidana ?
3. Tesis atas nama Ratih Tri Jayanati (Nim. B4B008214), Mahasiswi Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Tahun 2010 yang berjudul “Perlindungan Hukum Notaris Dalam Kaitannya Dengan Akta Yang Dibuatnya Manakala Ada Sengketa Di Pengadilan Negeri (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 72/Pdtg/PN.Pontianak), permasalahan yang dibahas dalam tesis tersebut adalah:
- a. Bagaimana perlindungan hukum notaris selaku pejabat umum yang membuat akta sesuai syarat formal ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ?
 - b. Apa akibat hukum dari putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap notaris ?
4. Tesis atas nama Riefki Adian (Nim. B4B006208), Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Tahun 2008 yang berjudul “Upaya dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Terhadap Sanksi-Sanksi Jabatan Di Kota Semarang”, permasalahan yang dibahas dalam tesis tersebut adalah:

- a. Bagaimanakah pelaksanaan upaya hukum bagi notaris yang dikenai sanksi jabatan ?
 - b. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi notaris oleh Majelis Pengawas Daerah dan Organisasi Notaris I.N.I dalam hal anggotanya dikenai sanksi jabatan ?
5. Tesis atas nama Andi Mulia Azmi (Nim. 097011010), Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Tahun 2011, yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Notaris Terhadap Akta Yang Dijadikan Dasar Pemeriksaan Polisi”, permasalahan yang dibahas dalam tesis tersebut adalah:
- a. Bagaimana kriteria akta notaris yang dapat diberikan Majelis Pengawas Daerah untuk dapat diperiksa polisi ?
 - b. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi notaris yang aktanya menjadi dasar pemeriksaan polisi ?
 - c. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh notaris terhadap putusan Majelis Pengawas Daerah yang telah menyetujui notaris untuk diperiksa oleh penyidik ?

Penelitian tesis yang akan dikaji oleh penulis merupakan sesuatu yang berbeda apabila dibandingkan dengan penelitian sebagaimana tersebut di atas, karena penelitian ini berbeda dalam perspektif analisis permasalahannya.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Melakukan sebuah penelitian diperlukan adanya landasan teoritis, sebagaimana dikemukakan oleh M. Solly Lubis bahwa landasan teoritis merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, asas maupun konsep yang relevan digunakan untuk mengupas suatu kasus ataupun permasalahan. Untuk meneliti mengenai suatu permasalahan hukum, maka pembahasan adalah relevan apabila dikaji menggunakan teori-teori hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum. Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis, yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum.²¹

Teori berasal dari kata *theoria* dimana dalam bahasa Latin artinya perenungan, sedangkan dalam bahasa Yunani berasal dari kata *thea* yang artinya cara atau hasil pandang.²² Cara atau hasil pandang ini merupakan suatu bentuk konstruksi di alam ide imajinatif manusia tentang realitas-realitas yang ia jumpai dalam pengalaman hidupnya. Maka dapatlah dikatakan kalau teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah.

Menurut Neuman, teori adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi yang berinterkoneksi satu sama lainnya atau berbagai ide yang

²¹ Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 54.

²² Otje Salman dan Anton Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 21.

memadatkan dan mengorganisasi pengetahuan tentang dunia. Ia adalah cara yang ringkas untuk berfikir tentang dunia dan bagaimana dunia bekerja. Bagi Sarantakos, teori adalah suatu set atau kumpulan atau koleksi atau gabungan proposisi yang secara logis terkait satu sama lain dan diuji serta disajikan secara sistematis. Menurut teori dibangun dan dikembangkan melalui *research* dan dimaksudkan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena.²³

Teori memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik. Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan. Teori adalah hasil pemikiran yang tidak akan musnah dan hilang begitu saja. Fungsi teori adalah untuk menstrukturisasikan penemuan-penemuan, membuat beberapa pemikiran, dan menyajikannya dalam bentuk penjelasan-penjelasan dan pertanyaan-pertanyaan. Hal ini berarti teori bisa digunakan untuk menjelaskan fakta dan peristiwa hukum yang terjadi. Untuk itu, orang dapat meletakkan fungsi dan kegunaan teori sebagai pisau analisis pembahasan tentang peristiwa atau fakta hukum yang diajukan dalam sebuah masalah.

1.1 Teori Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan hukum seperti apa yang tertulis di dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer bahwa suatu upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memperoleh perlindungan berdasarkan peraturan-peraturan atau Undang-Undang. Sedangkan menurut Kamus Hukum, perlindungan hukum adalah suatu upaya kepastian hukum untuk mendapatkan

²³ *Ibid.*, hlm. 22.

perlindungan berdasarkan peraturan-peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan negara dan sebagainya atau yang dapat berlaku bagi semua orang di suatu masyarakat atau negara.²⁴

Perlindungan hukum merupakan unsur yang harus ada dalam suatu negara. Setiap pembentukan negara pasti di dalamnya ada hukum untuk mengatur warga negaranya. Dalam suatu negara, terdapat hubungan antara negara dengan warga negaranya. Hubungan inilah yang melahirkan hak dan kewajiban. Perlindungan hukum akan menjadi hak bagi warga negaranya, namun di sisi lain perlindungan hukum menjadi kewajiban bagi negara.

Negara wajib memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya, sebagaimana di Indonesia yang mengukuhkan dirinya sebagai negara hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Indonesia adalah negara hukum”. Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum (dari tindakan sewenang-wenang seseorang) dalam bentuk perangkat hukum yang baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.²⁵

Perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan kewenangan.²⁶ Dalam hal ini notaris sebagai pejabat umum harus berhati-hati dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kewenangan yang diberikan negara kepadanya untuk

²⁴ <https://www.slideshare.net/mobile/notariat-unud/jurnal-ilmiah-mkn-unud-april-2012>, diakses pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015.

²⁵ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 2.

²⁶ *Ibid.*

membuat suatu akta autentik guna menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Dalam hal ini, dengan begitu banyaknya akta autentik yang dibuat oleh notaris, tidak jarang notaris tersebut dipermasalahkan oleh salah satu pihak atau pihak lainnya karena dianggap telah merugikan kepentingannya, baik itu dengan pengingkaran akan isi akta, tanda tangan, maupun kehadiran pihak di hadapan notaris.

Penggunaan teori ini erat kaitannya dengan penelitian dan tujuan penulisan ini, yaitu untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi seorang notaris saat akta yang dibuatnya disengketakan atau diperkarakan di pengadilan. Tentunya seorang notaris memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya dan bisa menggunakan hak-hak tersebut. Menurut Philipus M. Hadjon, pada hakekatnya perlindungan hukum itu berkaitan bagaimana hukum memberikan keadilan yaitu memberikan atau mengatur hak-hak terhadap subjek hukum, selain itu juga berkaitan bagaimana hukum memberikan keadilan terhadap subjek hukum yang dilanggar haknya.

Perlindungan hukum harus berdasarkan atas suatu ketentuan dan aturan hukum yang berfungsi untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.²⁷ Perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan tersebut ditujukan pada subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali bagi seorang notaris.²⁸ Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya perlu diberikan perlindungan hukum, antara lain pertama, untuk tetap menjaga kehormatan harkat dan martabat jabatannya

²⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

²⁸ Habib Adjie, *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 83.

termasuk ketika memberikan kesaksian dan berproses dalam pemeriksaan maupun persidangan. Kedua, menjaga minuta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris. Ketiga, merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta.

1.2 Teori Perjanjian

Di dalam perjanjian, terkandung beberapa asas yang dapat kita gunakan dalam menjawab rumusan masalah kedua berkaitan dengan akibat hukum terhadap akta yang dibuat oleh notaris saat disengketakan di pengadilan, yaitu:

a. Asas Itikad Baik

Prinsip itikad baik memiliki fungsi yang sangat penting dalam pembuatan sebuah akta autentik termasuk akta notaris. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 1338 KUHPdata ayat (3) dimana merupakan suatu keharusan bagi para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban atas sebuah kontrak yang tertuang dalam bentuk sebuah akta dengan dasar itikad baik. Dalam perkembangannya ketentuan ini ditafsirkan secara luas yang kemudian menghasilkan ketentuan bahwa itikad baik tidak saja berlaku pada tahap pelaksanaan, akan tetapi juga pada tahap penandatanganan dan tahap sebelum ditutupnya perjanjian (*pre-contractual fase*).²⁹

Terdapat dua makna itikad baik, pertama dalam kaitannya dengan pelaksanaan kontrak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata. Dalam kaitan ini itikad baik atau *bonafides* diartikan perilaku yang patut dan layak antara kedua belah pihak (*redelijkheid en billikheid*). Pengujian apakah suatu tingkah laku itu patut dan adil didasarkan pada norma-norma

²⁹ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 77.

objektif yang tidak tertulis. Kedua, itikad baik juga diartikan sebagai keadaan tidak mengetahui adanya cacat, seperti misalnya pembayaran dengan itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1386 KUHPerdara.³⁰

Asas ini dikaitkan terhadap para pihak yang datang kepada notaris. Karena makna itikad baik dapat juga diartikan bertindak sebagai pribadi yang baik. Itikad baik dalam pengertian subjektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Jika para pihak bisa menerapkan asas ini tentulah tidak akan menimbulkan permasalahan karena mereka beritikad baik dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang telah disepakati dalam sebuah akta notaris. Dari asas ini hakim diberikan kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan suatu perjanjian yang dituangkan dalam bentuk akta notaris, jangan sampai pelaksanaan itu melanggar kepatutan atau keadilan.

b. Asas Praduga Sah

Perlindungan hukum terhadap produk hukum seorang notaris dapat dilindungi dengan adanya suatu asas praduga sah. Asas praduga sah (*Vermoeden van Rechtmatigheid* atau *Presumptio Iustae Causa*) adalah asas yang menganggap sah suatu produk hukum sebelum adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan tidak sah.³¹ Dengan adanya asas ini maka akta autentik yang dibuat oleh notaris harus dianggap sah dan mengikat para pihak sebelum dapat dibuktikan ketidakabsahan dari aspek lahiriah, formal dan materil atas akta autentik tersebut. Apabila tidak dapat dibuktikan maka akta yang bersangkutan tetap sah mengikat para pihak atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Habib Adjie, *op, cit.*, hlm. 85.

c. Asas Kepribadian (Personalitas)

Asas kepribadian, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *the principle of personality*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *het principe van de persoonlijkheid* merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja.³² Hal ini dapat dilihat di dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdata, dimana Pasal 1315 KUHPerdata berbunyi “pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”. Inti ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 KUHPerdata berbunyi “perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya”. Ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka saja yang membuatnya. Namun, ketentuan itu ada pengecualiannya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1317 KUHPerdata, yang berbunyi “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu”.

Asas kepribadian mengandung makna kalau perjanjian itu berlaku di antara para pihak yang membuatnya, dan ada pengecualian jika seseorang mengadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga dengan suatu syarat yang ditentukan. Ketentuan dalam asas ini dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama dan kedua yaitu saat akta notaris dipermasalahkan di pengadilan, dimana akta notaris itu ada dikarenakan keinginan para pihak. Apa yang tertuang dalam akta notaris merupakan keinginan para pihak, bukan keinginan notaris.

³² Salim, HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2015, hlm. 13.

Notaris hanyalah pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta notaris.

1.3 Teori Pembuktian

Membuktikan berarti memberikan kepastian mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Membuktikan juga bisa memberikan kepastian yang nisbi atau relatif dimana sifatnya memiliki tingkatan-tingkatan yaitu kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka atau bersifat intuitif dan kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal.³³

Pembuktian merupakan cara untuk menunjukkan kejelasan perkara kepada hakim supaya dapat dinilai apakah masalah yang dialami penggugat atau korban dapat ditindak secara hukum. Oleh karenanya, pembuktian merupakan prosedur yang harus dijalani karena merupakan hal penting dalam menerapkan hukum materil. Sebagai pedoman, ketentuan dalam pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa barang siapa yang mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana ia mendasarkan sesuatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu; sebaliknya barang siapa yang mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu”.

Tugas pengadilan yang sangat berat, adalah menjaga kepentingan kedua belah pihak atau para *justiciable*, agar kedua belah pihak itu tidak ada yang dirugikan. Tugas ini harus benar-benar dijalankan dengan begitu saja memberikan kepada salah satu pihak untuk membuktikan. Perbuatan ceroboh ini akan dapat merugikan atau menguntungkan salah satu pihak. Karena beban pembuktian itu tidak boleh berat sebelah sebab tidak setiap orang dapat membuktikan sesuatu

³³ Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 93.

yang benar dan dimungkinkan pula seseorang dapat membuktikan apa yang tidak benar.

Maka dari itu, pihak yang berperkara haruslah memberikan bukti yang kuat sesuai dengan masalah yang ada dan perkara yang dialami. Berkaitan dengan materi pembuktian maka dalam proses gugat menggugat, beban pembuktian dapat ditujukan kepada penggugat, tergugat, maupun pihak ketiga yang melakukan intervensi. Pada prinsipnya, siapa yang mendalilkan sesuatu maka ia wajib membuktikannya. Teori pembuktian ini dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah kedua. Pada saat akta yang dibuat oleh seorang notaris dijadikan alat bukti di pengadilan dan bagaimana analisa hakim terhadap akta tersebut maupun notarisnya serta bagaimana akibat hukumnya.

Notaris berhak mendapatkan perlindungan hukum terkait akta yang dibuatnya. Hal ini dikarenakan notaris adalah satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

2. Kerangka Konseptual

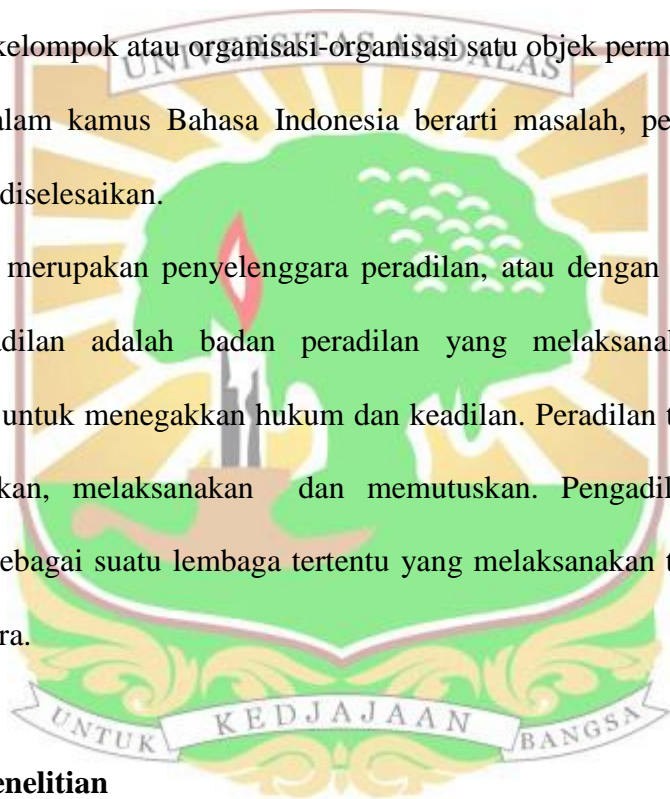
Kerangka konseptual merupakan pengembangan *image* untuk menerjemahkan suatu ide atau gagasan yang biasanya berbentuk kata. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstrak yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi operasional. Kegunaan dari adanya konsepsi agar ada pegangan dalam melakukan penelitian atau penguraian,

sehingga dengan demikian memudahkan bagi orang lain untuk memahami batasan-batasan atau pengertian-pengertian yang dikemukakan.

Soejono Soekanto berpendapat bahwa kerangka konsepsi pada hakekatnya merupakan suatu pengarah atau pedoman yang lebih konkrit dari kerangka teoritis yang seringkali bersifat abstrak, sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang menjadi pegangan konkrit dalam proses penelitian. Menghindari kesimpangsiuran dalam menafsirkan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, dikemukakan beberapa definisi operasional yang merupakan judul dari penelitian agar memudahkan pemahaman kita nantinya, adalah sebagai berikut:

- a. Perlindungan hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, serta teror dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan. Perlindungan hukum dapat juga dikatakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.
- b. Notaris, adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.

- c. Akta, adalah surat yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum tentang segala hal yang disebut di dalam surat itu sebagai pemberitahuan langsung dengan perihal pada akta itu.
- d. Sengketa; dalam kamus Bahasa Indonesia berarti pertentangan atau konflik, konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi satu objek permasalahan.
- e. Perkara; dalam kamus Bahasa Indonesia berarti masalah, persoalan, urusan yang harus diselesaikan.
- f. Pengadilan merupakan penyelenggara peradilan, atau dengan perkataan yang lain pengadilan adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan. Peradilan tugasnya adalah menyelesaikan, melaksanakan dan memutuskan. Pengadilan dapat juga dikatakan sebagai suatu lembaga tertentu yang melaksanakan tugas mengadili suatu perkara.



G. Metode Penelitian

Penelitian adalah usaha atau pekerjaan untuk mencari kembali yang dilakukan dengan suatu metode tertentu dengan cara hati-hati, sistematis serta sempurna terhadap permasalahan, sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan atau menjawab problemanya. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan

menganalisisnya. Kecuali itu, maka diadakan juga pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

Metode penelitian merupakan suatu sistem dan suatu proses yang mutlak harus dilakukan dalam suatu kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Sebagai suatu penelitian ilmiah, maka rangkaian kegiatan penelitian dinilai dari pengumpulan data sampai pada analisis data dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah ilmiah sebagai berikut:

1. Sifat dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan bersifat perspektif analisis. Bersifat perspektif analisis maksudnya penelitian ini mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validasi aturan hukum yang dihadapi.³⁴ Analitis dimaksudkan berdasarkan gambaran fakta yang diperoleh akan dilakukan secara cermat bagaimana menjawab permasalahan.

Jenis penelitian yang digunakan disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat di dalamnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa hukum yang tertulis dari bahan pustaka atau data sekunder belaka yang lebih dikenal dengan nama bahan sekunder dan bahan acuan dalam bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum.

Penelitian hukum normatif dimaksudkan untuk mengadakan pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi perundang-undangan yang berlaku serta doktrin-doktrin. Dalam penelitian ini, penelitian hukum normatif bertujuan

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 35.

untuk meneliti perlindungan hukum bagi notaris terhadap akta yang dibuatnya jika terjadi sengketa di pengadilan.

Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif atau pendekatan perundang-undangan. Dengan tujuan untuk mengadakan pendekatan terhadap permasalahan dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai perlindungan hukum bagi notaris terhadap akta yang dibuatnya jika terjadi sengketa di pengadilan dengan tujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum.

2. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1. Library Research

Library research atau penelitian kepustakaan merupakan pengambilan data dari buku-buku, literatur-literatur, serta bacaan lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Adapun tempat-tempat melakukan penelitian kepustakaan ini antara lain:

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan, Universitas Andalas, Padang;
- b. Perpustakaan Bung Hatta, Kota Bukittinggi;
- c. Buku-buku dan literatur hukum yang dimiliki penulis yang berkaitan dengan penelitian ini, dan;
- d. Situs-situs hukum, ataupun kenotariatan dari internet yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. Jenis Data

1. Data Sekunder

Data yang sudah diolah dan diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, teori atau pendapat para ahli, jurnal-jurnal hukum, hasil-hasil penelitian seperti skripsi, tesis, dan makalah. Data ini bersumber dari:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan mempunyai kekuatan hukum, yang dikeluarkan atau dirumuskan oleh legislator dan pemerintah, seperti:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata),
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris,
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pemberhentian Notaris,
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-06.AH.02.10 Tahun 2009 tentang Sekretariat Majelis Pengawas Notaris,

10. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor KMA/006/SKB/VII/1987, Nomor M.04-PR.08.05 Tahun 1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan, dan Pembelaan Diri Notaris,
 11. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.13-HT.03.10 Tahun 1993, tanggal 24 Februari 1993, tentang Pembinaan Notaris,
 12. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.HT.03.01 Tahun 2003 tentang Syarat-Syarat Jadi Notaris,
 13. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39 - PW.07.10 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris,
 14. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat-Syarat Pemberhentian Notaris,
 15. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris,
 16. Berbagai peraturan perundang-undangan yang menyangkut Hukum Perdata Materil ataupun Hukum Acara Perdata maupun Hukum Acara Pidana.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum, hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan permasalahan perlindungan

hukum bagi notaris terhadap akta yang dibuatnya jika disengketakan di pengadilan, profesi notaris, jurnal-jurnal hukum, dan pendapat-pendapat pakar hukum mengenai permasalahan yang akan diteliti.

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atau pemahaman akan bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus-kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang membantu penulis menterjemahkan istilah yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data mempunyai hubungan erat dengan sumber data, karena dengan pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai kehendak yang diharapkan. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu studi dokumen, dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur-literatur, jurnal-jurnal hukum, jurnal-jurnal notaris yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

4. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data menggunakan teknik *editing*, yaitu data-data yang telah diperoleh, kemudian data tersebut disusun secara sistematis dan dikoreksi lagi guna meningkatkan keabsahan data, sehingga data tersebut bisa diproses selanjutnya seperti memeriksa apakah jawaban-jawaban responden cukup logis dan terdapat kesesuaian antara jawaban yang satu dengan yang lain, apakah jawaban sudah relevan dengan pertanyaan, apakah kalimat dalam pertanyaan dan jawaban sudah jelas maknanya agar tidak menyebabkan salah penafsiran.

b. Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu menggunakan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli hukum, buku-buku atau literatur-literatur yang terkait dengan penelitian, kemudian ditarik kesimpulan yang dijabarkan dalam penulisan deskriptif.



